

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELUARGA DALAM INDUSTRI MEBEL

Andrean Sianggono dan Ronny H. Mustamu

Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

E-mail: m31413020@john.petra.ac.id ; mustamu@petra.ac.id

Abstrak — Subjek penelitian adalah perusahaan milik keluarga yang bergerak pada industri mebel. Seratus persen saham subjek penelitian dimiliki oleh keluarga pendiri. Saat ini subjek penelitian dikelola oleh generasi kedua dari pendiri. Status kepemilikan, status pengelola dan pelibatan lintas generasi dalam bisnis menjadikan subjek dapat disebut sebagai bisnis keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada subjek penelitian. *Good Corporate Governance* akan dikaji dari lima elemen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada subjek penelitian masih terdapat kekurangan pada prinsip Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi

Kata Kunci — *Good Corporate Governance, family business, TARIF, Furniture industry*

I. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance atau disingkat GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik (Zarkasyi, 2008). *Good corporate governance* adalah salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang. Didalam penerapannya *good corporate governance* bertindak sebagai norma atau aturan atau kaidah yang mengatur seluruh *stakeholder* yang berkepentingan di dalam perusahaan.

Pada tahun 1998 berdampak luas didalam negara – negara seperti Indonesia, Thailand, dan Korea selatan negara – negara yang sempat menjadi “*The Asian Tiger’s*” harus mengakui bahwa pondasi ekonomi mereka rapuh. Krisis ekonomi pada tahun 1998 menjadi momentum bagi pelaku pasar untuk menyadari pentingnya implementasi *good corporate governance*. Krisis ekonomi 1998 selain merupakan sebuah kesalahan arsitektur finansial yang ada tetapi juga diakibatkan oleh kesalahan otoritas finansial dalam mengatur aktivitas perekonomian kita pada level praktikal dan mikro. Krisis 1998 tak lain merupakan kesalahan dalam *governance* di sektor politik dan perbankan negara. Tidak menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan aturan atau disebut dengan *Bad Governance* inilah yang menghantarkan negara – negara macan asia menuju krisis finansial.

Dalam era globalisasi banyak sekali perusahaan baru yang bermunculan yang membuat persaingan semakin ketat, diantara perusahaan yang berdiri ada yang merupakan

perusahaan keluarga dan ada yang non-keluarga. Kebanyakan masyarakat memiliki pemikiran bahwa perusahaan non-keluarga memiliki kemampuan bersaing yang lebih hebat dibandingkan perusahaan keluarga pada umumnya dikarenakan dalam perusahaan keluarga terdapat perbedaan cara berpikir dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Pada perusahaan keluarga seluruh pengelola adalah anggota keluarga di mana potensi munculnya konflik akan terjadi lebih besar dikarenakan adanya perbedaan dalam keluarga dan bisnis di mana pada urusan keluarga menggunakan hati dan urusan bisnis menggunakan otak, membuat perusahaan akan sulit untuk maju jika terdapat perbedaan pendapat dalam anggota keluarga sebagai pengelola maupun pemegang saham. Sedangkan pada bisnis non-family seluruh pengelola dan pemegang saham bekerja dengan satu tujuan yaitu untuk memajukan perusahaan sehingga pada operasional perusahaan akan lebih mudah untuk dikendalikan karena kontrol pada perusahaan terdapat pada organ tertentu.

Dalam sebuah korporasi tentu mencakup banyak orang atau pihak yang berkepentingan didalamnya, hal ini memicu *Good Corporate Governance* menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dalam korporasi atau perusahaan. Subjek penelitian yang notaben adalah sebuah *Family Business* atau Bisnis keluarga dan Non Tbk yang sahamnya tidak terbuka untuk umum tetap harus menjalankan atau menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate governance* tidak hanya harus digunakan oleh perusahaan yang notaben adalah perusahaan Tbk yang sahamnya dijual bebas di bursa saham namun wajib digunakan di dalam semua perusahaan baik Tbk maupun non Tbk.

Poza (2010) mengatakan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang control kepemilikan, partisipasi manajerial, dan nilai - nilai yang dianut pendiri perusahaan atau CEO generasi dan satu atau lebih anggota keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan. Sedangkan menurut Donneley (2002) dalam Susanto (2007) Perusahaan keluarga dicirikan terutama dengan kepemilikan dan keterlibatan yang signifikan dari keluarga dalam manajemen. Dengan sendirinya anggota keluarga akan mengantisipasi bahwa kepemimpinan (*leadership*) dan pengawasan (*control*) dilakukan oleh keluarga dan akan diturunkan kepada generasi penerus. Pengambilan keputusan dan kebijakan, penyusunan strategi dan kegiatan bisnis sehari – hari dilakukan oleh keluarga. Menurut pengertian oleh Poza dan Susanto subjek penelitian merupakan perusahaan keluarga dikarenakan adanya lintas generasi di mana subjek penelitian

dikelola oleh generasi kedua dari pendiri dan adanya kontrol atas perusahaan di mana seluruh pemegang saham merupakan anggota keluarga.

Menurut Susanto (2007) Pengelolaan perusahaan terkait pula dengan pengelolaan konflik yang ada didalamnya. Konflik dalam perusahaan keluarga dapat dirumuskan sebagai suatu situasi ditempat kerja di mana dua atau lebih orang atau kelompok orang dalam keluarga mempunyai ide, pandangan, argumentasi, persepsi dan pendapat yang berlawanan atau kontradiktif sehingga mereka saling menyalahkan yang berakibat pada perusahaan.

Konflik dalam perusahaan dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

1. Konflik antara Kepentingan Bisnis dan Kepentingan Keluarga

System keluarga mempunyai karakteristik melihat ke dalam (*inward looking*). Keputusan dilakukan berdasarkan emosi, dan masing – masing anggota keluarga menerimanya tanpa syarat. *Sharing* antar anggota keluarga sudah menjadi kebiasaan sehingga mereka satu sama lain saling membantu dan menguatkan. Sementara itu bisnis lebih bersifat melihat keluar (*outward looking*) ikatan antara karyawan dan pemilik atau pendiri adalah berdasarkan komitmen dan tugas sehingga ikatan emosional bisa saja tidak ada

2. Konflik Antar Anggota Keluarga

Konflik dalam keluarga dapat dirangkum dalam empat hal, yaitu konflik tujuan, gaya hidup dan kerja, konflik menyangkut kendali perusahaan, serta *leaving the nest* (meninggalkan rumah) Seringkali tujuan untuk bisnis, tujuan untuk keluarga terdekat, dan tujuan untuk diri sendiri bisa berbeda dan menyebabkan konflik

3. Konflik Antara Keluarga dan Karyawan

Konflik nilai antara keluarga dengan karyawan biasanya terletak profesionalitas dan kepercayaan. Anggota keluarga yang terjun di perusahaan dituntut agar professional dengan kompetensi kuat yang ditunjukkan dalam kinerjanya sebanding dengan tuntutan perusahaan kepada karyawan atau professional yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

Untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat perusahaan perlu mengkaji ulang sejauh mana penerapan *good corporate governance* yang sudah diterapkan perusahaan dari prinsip *transparency, acountability, responsibility, independency and Fairness*. Peranan *good corporate governance* tidak hanya diperlukan oleh perusahaan yang sahamnya dijual untuk umum atau TBK, namun juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan keluarga atau *family business* agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu bersaing oleh perusahaan-perusahaan lain.

Peranan *good corporate governance* pada perusahaan keluarga diperlukan untuk membuat suatu sistem pada perusahaan yang baik untuk menutupi kekurangan dari bisnis keluarga dan menyalurkan seluruh organ perusahaan. *Good corporate governance* akan membuat perusahaan keluarga dapat berlangsung lama dari generasi ke generasi dan menghindari adanya konflik pada bisnis keluarga.

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak kepentingan (Sujoko,2009). *Good Corporate Governance* disini adalah sebuah media untuk perusahaan menjadi lebih baik lagi, menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, membantu kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan menciptakan pertambahan nilai bagi pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan yaitu *stakeholder*.

Menurut KNKG(2006) Di dalam *Good Corporate Governance* ada lima prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran atau kesetaraan. Kelima prinsip tersebut diperlukan untuk membantu perusahaan agar tercapai tujuannya kelima prinsip tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Untuk prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan keluarga pada bidang mebel yang berdiri sejak 1979. Perusahaan dikelola oleh anggota keluarga pendiri dan seratus persen saham perusahaan dimiliki oleh anggota keluarga. Jumlah pekerja pada perusahaan mencapai 3200 pekerja terdiri dari 200 karyawan dan 3000 buruh. Penyampaian laporan

keuangan diberikan kepada pemegang saham, pengendalian perusahaan dilakukan oleh Diretur utama dan rapat umum pemegang saham pada perusahaan dilakukan secara informal oleh anggota keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Keluarga dalam Bidang Industri Mebel.

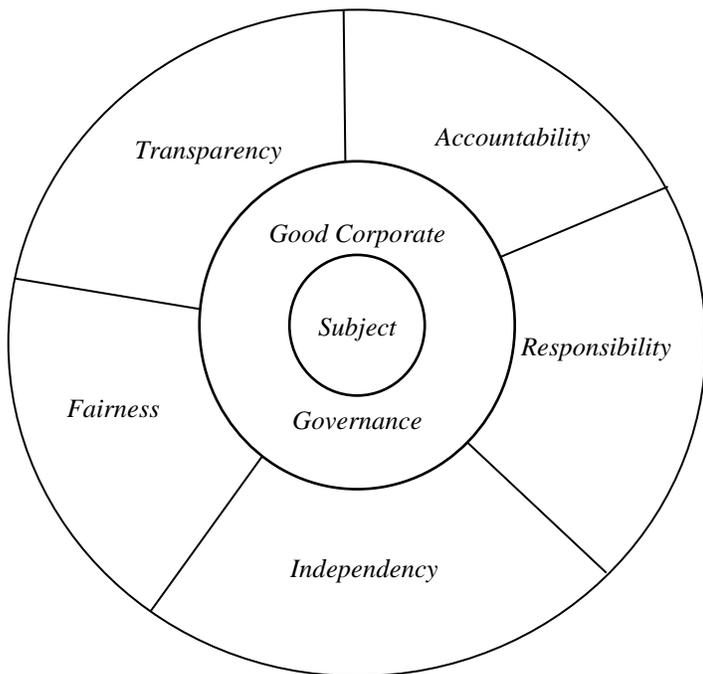
Rumusan masalah

Bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Keluarga dalam Bidang Industri Mebel?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan penerapan prinsip – prinsip *Good Coporate Governance* pada Perusahaan Keluarga dalam Bidang Industri Mebel?

Kerangka Berpikir



Sumber : KNKG dan diolah penulis

II METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong(2013) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”

Menurut Sugiyono (2013) Deskriptif "adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2013) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan pengumpulan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari narasumber pada subjek penelitian melalui rekaman dan bukti foto dan data sekunder adalah dokumen dari perusahaan data ini digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh dari wawancara dan dibandingkan dengan dokumen atau laporan dari subjek penelitian.

Teknik penetapan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pusposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Sugiyono, 2013) adalah

1. Pengumpulan data
Pada tahap ini peneliti mendapat informasi dari wawancara dan melihat melalui dokumentasi perusahaan.
2. Reduksi atau pemilahan data
Pada tahap ini penulis mengumpulkan semua data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi dari perusahaan lalu penulis memilih data mana yang sesuai dengan hal yang ingin diteliti oleh penulis yaitu *Good Corporate Governance*.
3. Kategorisasi
Dalam tahap ini peneliti menganalisis data yang didapatkan sesuai dengan kelima prinsip dalam *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* dan mengumpulkan data – data yang di dapat sesuai dengan masing – masing kategori atau prinsip
4. Pemeriksaan keabsahan data
Melakukan konfirmasi memastikan data yang diterima benar – benar alamiah dan dapat dipercaya. Keabsahan data merupakan konsep validitas ataupun reabilitas dalam penelitian kualitatif
5. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Pada tahap ini kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance pada perusahaan.

Transparency

Prinsip transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (KNKG,2006)

Pada prinsip transparansi pada subjek penelitian dibagi menjadi 3 poin yaitu :

1. Keterbukaan Informasi
2. Pengambil Kebijakan Strategik
3. Struktur Organisasi

Pada poin pertama yaitu keterbukaan informasi perusahaan sudah berjalan dengan baik namun masih kurang sempurna. Laporan keuangan pada subjek penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dikarenakan subjek penelitian merupakan perusahaan keluarga maka perusahaan hanya memberikan laporan keuangan kepada seluruh anggota keluarga pemegang saham perusahaan saja dalam bentuk print out. Namun penerapan transparansi pada subjek penelitian dalam poin keterbukaan informasi tidak bisa sempurna dikarenakan perusahaan tidak menyampaikan informasi seperti visi dan misi dengan jelas kepada seluruh pekerja tidak ada tulisan mengenai visi dan misi yang jelas tertulis di subjek penelitian.

Pada poin kedua yaitu pengambil kebijakan strategik berdasarkan hasil wawancara seluruh pengambilan keputusan pada subjek penelitian sudah baik di mana seluruh keputusan operasional perusahaan berada pada tangan direktur utama dengan begitu pengambilan keputusan perusahaan dapat terjadi dengan cepat dan memperlancar operasional perusahaan.

Pada poin ketiga dalam transparansi yaitu Struktur organisasi pada subjek penelitian sudah cukup baik namun masih tidak bisa dikatakan sempurna sebab dalam struktur organisasi yang ada pada subjek penelitian masih belum sesuai dengan UU no 40 tahun 2007 mengenai PT, dikarenakan posisi jabatan tertinggi adalah komisaris dan Direktur setara dengan Wakil Direktur. Pada poin ini RUPS pada Subjek penelitian sebagai perusahaan keluarga dilakukan secara Informal saat keluarga pemegang saham sedang berkumpul bersama dan membicarakan mengenai perusahaan.

Accountability

Akuntabilitas perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Pada prinsip akuntabilitas pada subjek penelitian dibagi menjadi 2 poin yaitu :

1. Kejelasan ukuran kinerja
2. Kejelasan aturan perusahaan

Dalam kegiatan organisasinya subjek penelitian selalu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing divisi secara jelas dan terarah dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Namun dalam operasional subjek penelitian tidak memiliki ukuran kinerja yang tertulis dengan jelas sebagai tolak ukur pencapaian strategi perusahaan. Menurut wawancara dengan Direktur Keuangan seluruh ukuran kinerja pada subjek penelitian masih secara informal begitu juga dalam hal pemberian *reward and punishment* pada subjek penelitian menurut hasil wawancara dengan Direktur Keuangan *reward and punishment* pada subjek penelitian

masih secara informal meskipun berdasarkan hasil wawancara narasumber mengatakan bahwa para karyawan yang memiliki kinerja yang baik selalu mendapatkan *reward* berupa bonus gaji ataupun kendaraan dari perusahaan.

Dari segi poin ke dua yaitu aturan perusahaan, pada subjek penelitian masih bersifat informal perusahaan tidak memberikan aturan yang jelas mengenai aturan perusahaan menurut hasil wawancara seluruh aturan perusahaan dan kode etik pada subjek penelitian masih bersifat informal yang sewajarnya.

Responsibility

Responsibilitas, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (KNKG,2006)

Pada prinsip responsibilitas pada subjek penelitian dibagi menjadi 4 poin yaitu :

1. Kepatuhan perusahaan terhadap hukum
2. Tanggung jawab perusahaan kepada tenaga kerja
3. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat (CSR)
4. Tanggung jawab perusahaan kepada Lingkungan (CSR)

Pada poin pertama dalam responsibilitas subjek penelitian selalu mentaati hukum yang berlaku seperti membayar pajak dan legalitas kayu di mana subjek penelitian adalah perusahaan industri mebel maka bahan baku yang digunakan adalah kayu dan untuk mendapatkan bahan baku kayu harus dengan surat ijin dari pemerintah.

Pada poin kedua pada responsibilitas mengenai tanggung jawab perusahaan kepada tenaga kerja berdasarkan wawancara pada subjek penelitian seluruh pekerja pada subjek penelitian sudah dilengkapi dengan asuransi kerja (BPJS) dan subjek penelitian selalu memberikan jatah cuti dalam jangka waktu sebulan 2 hari. Namun dalam hal pemberian gaji pada subjek penelitian masih belum sesuai dengan UMK yang ditetapkan. Menurut hasil wawancara perusahaan berusaha untuk membayar sesuai jumlah UMK dengan kenaikan setiap 3 bulan sekali (Caturwulan) di mana kenaikan upah dari UMK lama menjadi UMK sekarang membutuhkan waktu 3 caturwulan atau 9 bulan hingga upah yang diberikan sesuai dengan UMK saat ini.

Pada poin ketiga yaitu tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat berdasarkan hasil wawancara, subjek penelitian sudah melakukan tanggung jawab kepada masyarakat dengan baik di mana perusahaan selalu memberikan hasil reject dari perusahaan kepada para masyarakat sekitar. Selain itu perusahaan juga sering mendirikan panggung hiburan pada saat-saat tertentu.

Pada poin ke empat yaitu tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan berdasarkan hasil wawancara subjek penelitian memiliki lahan sebesar 6000 hektar untuk symbol penghijauan, selain itu subjek penelitian ikut membersihkan kali tengah di mana kali tengah merupakan sungai yang mengalir sekitar 66 perusahaan disekitar wilayah subjek penelitian namun hanya ada 5 perusahaan yang ikut bertanggung jawab membersihkan salah satunya adalah subjek penelitian.

Independency

Dalam pembahasan mengenai independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (KNKG,2006)

Pada pembahasan independensi pada subjek penelitian terkadang masih ada intervensi dari anggota keluarga di mana terkadang jika terdapat anggota keluarga yang membutuhkan meubel untuk keperluan di rumah maka perusahaan akan membuat meubel untuk kepentingan anggota keluarga tertentu.

Pada subjek penelitian berdasarkan hasil wawancara juga terdapat organ atau divisi yang bertanggung jawab kepada beberapa organ sekaligus yaitu bagian *merchandise* dikarenakan sistem organisasi pada subjek penelitian menggunakan sistem organisasi matriks kepada para *merchandise*. Di mana pada sistem organisasi tersebut pekerja dapat memiliki tanggung jawab kepada beberapa divisi sekaligus dalam pekerjaannya

Fairness

Dalam pembahasan mengenai kesetaraan dan kewajaran perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing (KNKG,2006)

Pada Pembahasan mengenai kesetaraan dan kewajaran pada subjek penelitian berdasarkan hasil wawancara, Komisaris sebagai pemilik saham pada subjek penelitian tidak lagi memegang kendali pada perusahaan dan menyerahkan seluruh hak perusahaan kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu maka seluruh keputusan perusahaan dikendalikan oleh keempat anak komisaris sebagai pemegang saham.

Pada prinsip kesetaraan dan kewajaran pada subjek penelitian juga membuka kesempatan berkarir yang sama tidak memandang suku, agama dan ras tertentu terbukti keragaman pekerja pada subjek penelitian berdasarkan suku dan agama diusahakan berimbang.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada subjek penelitian penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada subjek penelitian yang sejauh ini diterapkan terdapat tiga elemen yang tidak sesuai dengan pedoman *Good Corporate Governance* yaitu Akuntabilitas, Responsibilitas dan Independensi

Pada prinsip transparansi pada subjek penelitian dapat dikatakan sudah baik. Namun akan lebih baik jika perusahaan menyampaikan Visi dan misi perusahaan dengan jelas kepada seluruh pekerja di perusahaan

Pada prinsip akuntabilitas pada subjek penelitian masih tidak dijalankan sesuai dengan pedoman *Good Corporate Governance* di mana pada perusahaan tidak terdapat ukuran kinerja dan aturan dengan jelas semua aturan masih dijalankan secara informal dan sewajarnya.

Pada prinsip responsibilitas pada subjek penelitian masih masih tidak dijalankan sesuai dengan pedoman *Good*

Corporate Governance di mana ada satu poin yang tidak dilakukan oleh perusahaan yaitu dalam poin tanggung jawab perusahaan kepada tenaga kerja di mana perusahaan masih tidak memberikan gaji sesuai dengan UMK yang berlaku.

Pada prinsip Independensi pada subjek penelitian masih tidak dijalankan sesuai dengan pedoman *Good Corporate Governance* dikarenakan pada operasional perusahaan masih terdapat intervensi dari kepentingan anggota keluarga tertentu.

Pada prinsip kesetaraan dan kewajaran sudah cukup baik di mana komposisi pekerja pada subjek penelitian diusahakan berimbang berdasarkan Suku, Ras, dan Agama.

Saran

1. Visi dan misi hendaknya disampaikan dengan jelas kepada seluruh karyawan, hal ini demi menghadirkan prinsip Transparansi dengan baik.
2. Ukuran kinerja dan peraturan perusahaan perlu dibuat dan disampaikan dengan jelas kepada para karyawan, hal ini demi menghadirkan prinsip akuntabilitas dengan baik
3. Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk memberikan gaji kepada seluruh karyawan dan buruh sesuai dengan UMK yang berlaku, hal ini demi menghadirkan prinsip Responsibility dengan baik
4. Perlu dibangun kesepakatan bersama agar dapat dilakukan pemilahan antara kepentingan keluarga dan kepentingan perusahaan, hal ini demi menghadirkan prinsip independensi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- ACGA. (2014). *Asean Corporate Governance scorecard Country report and Assesment 2013-2014*. Retrieved maret 25, 2017 from : <https://www.adb.org/publications/asean-corporate-governance-scorecard-country-reports-and-assessments-2013-2014>
- Andrew E.S. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Erlangga.
- Dharma, A. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Rosdakarya
- Ernesto J.P. (2010). *Family Bussines*. USA : Thomson
- FCGI. (2011). *Tata kelola perusahaan (Corporate Governance) Jilid II. Peranan dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata kelola perusahaan)*. Retrieved april 6, 2017 From : <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bkp>
- KNKG. (2006). *Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia*. Retrieved april 5, 2017 from : http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf
- KNKG. (2011). *Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance*. Retrieved maret 25, 2017 from : <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Manajemen-Risiko-Berbasis-GCG.pdf>
- Moleong, L.J. (2013). *Metodologi penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- OECD. (2014). *Corporate Governance in Asia Asian roundtable on Corporate Governance*. Retrieved april 4, 2017 from : <https://www.oecd.org/daf/ca/48806174.pdf>
- Ristifani (2009). *Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance(GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*. Retrieved april 6, 2017 From : http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205506.pdf
- Sawyer, Lawrence B, Mortimer D.A, James S.H. (2005). *Internal Auditing, Jilid 1, Edisi 5*, Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan kuantitatif R dan D* Bandung : Alfabeta
- Sujoko. (2009). *Good Corporate Governance dan kebijakan keuangan perusahaan*. Surabaya : Untag Press
- Surya,S.,Yustiavandana.I. (2008). *Penerapan Good Corporate Governance mengesampingkan hak-hak istimewa dan kelangsungan usaha*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Susanto, A.B., Wijanarko, H., Susanto, P. Mertosono, S. (2007). *The Jakarta Consulting Group, Family Business*, Jakarta : Publishing Division The Jakarta Consulting Group
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika Indonesia.
- Wibisono, D. (2006). *Manajemen Kinerja: Konsep Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Zarkasyi, W. (2008). *Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya*. Bandung : alfabeta